**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pembagunan nasional di bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK), serta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberlakuan Undang-undang (UU) RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sentralistik adalah pengelolaan pendidikan yang bersifat terpusat, sedangkan desentralistik adalah pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum mengacu pada Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.[[1]](#footnote-2)

Desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaan di sekolah.

Kurikulum adalah seperangkat terencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan Pendidikan tertentu mencakup tujuan Pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah suatu Pendidikan dan peserta didik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penyempurnaan kurikulum. Kebijakan penyempurnaan adalah mengganti kurikulum lama dengan kurikulum yang baru sehingga kurikulum menjadi lebih baik lagi, kurikulum di Indonesia sudah mengalami perkembangan sejak periode sebelum tahun 1945, kurikulum tahun 2006 yang berlaku sampai akhir tahun 2012, hingga kurikulum 2013 yang sedang dijalankan dibeberapa sekolah saat ini. Menurut beberapa pakar, perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik di Indonesia maupun di negara lain disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berkembang dan tuntutan zaman yang cenderung berubah. Oleh karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 merupakan bentuk penyempurnaan dari KTSP, lebih pada nalar dan keaktifan siswa serta upaya untuk meningkatan efektifitas pembelajaran pada satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Kurikulum 2013 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa jangka panjang, sebab pendidikan tidak dapat di rasakan secara langsung tapi di rasakan dimasa depan. Alasan adanya perubahan kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan harus di sesuaikan dengan tuntutan zaman. Karena zaman berubah, maka kurikulum harus lebih berbasis pada penguatan penalaran bukan lagi hafalan semata. Perubahan ini diputuskan dengan merujuk pada hasil survai internasional tentang kemampuan siswa indonesia salah satunya adalah survei “*Trends in international math and* *science”* oleh global institute pada tahun 2007. Menurut survei ini, hanya 5% siswa indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran.[[2]](#footnote-3)

Pola pembelajaran baru di sekolah menggunakan kurikulum 2013 merubah pola fikir dari terpusat ke pada guru menjadi kepada siswa. Jadi guru yang pada awalnya sebagai sumber informasi sekarang siswa yang aktif untuk mencari informasi terlebih dahulu. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, siswa dapat memperoleh sumberbelajar dengan sangat mudah, akses internet dan kecanggihan teknologi mendominasi perkembangan siswa untuk aktif mencari. Pada dasarnya teknologi dan informasi menjadi sarana wajib dalam pembelajaran kurikukulum 2013 yang di terapkan pada saat proses pembelajaran.

Dalam survei yang di lakukan oleh Muh. Nuh di sebagian sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 mengatakan bahwa :

hasil survei evaluasi yang dilakukan cukup menggembirakan dan mendapat respons positif baik dari pihak sekolah maupun guru pengajarnya sehingga meyakinkan untuk melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun depan di seluruh sekolah.[[3]](#footnote-4)

Menurut Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memutuskan bahwa :

penerapan Kurikulum 2013 hanya diterapkan di 6.221 sekolah saja sisanya kembali melaksanakan Kurikulum 2006. Dalam Peraturan Mendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, yang ditandatangani pada 11 Desember 2014, Pasal 1 disebutkan Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013,dan pada pasal 4 disebutkan Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama sampai tahun ajaran 2019/2020.[[4]](#footnote-5)

SMP Negeri 1 Bonegunu adalah sekolah yang tergolong masih menerapkan Kurikulum 2013 terhitung dari semester pertama tahun 2014/2015. Akan tetapi setelah mendengarkan penegasan dari Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan yang memutuskan untuk memberhentikan kurikulum 2013 dan telah dilakukan pembatasan dalam artian sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 telah kembali melaksanakan kurikulum 2006. Padahal kita tahu bersama bahwa pada Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan, dimana peserta didik ditekankan lebih aktif dibanding pendidik. Dan lebih bagusnya lagi, Pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013 menerapkan pendekatan pembelajaran *Scientific approach* (pendekatan ilmiah). Pendekatan ini berbeda dari pendekatan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Karena Pada setiap langkah inti proses pembelajarannya, guru melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan ilmiah. Bahkan pada pendekatan pembelajaran *scientific approach* ini, akan menyentuh beberapa ranah pencapaian hasil belajar yang tertuang pada kegiatan pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan Hasil belajar harapannya melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.

Oleh sebab itu, berdasarkan observasi awal saya dilapangan terkait dengan penegasan Anies Baswedan di atas SMP Negeri 1 Bonegunu telah kembali melaksanakan kurikulum 2006 sehingga menimbulkan beragam macam respons dari guru-guru SMP Negeri 1 Bonegunu. Respons pertama, terdapat pandangan yang acuh tak acuh (tdak begitu peduli) dengan pergantian kurikulum 2013. Kedua, sebagian besar guru memandang bahwa pembatasan kurikulum 2013 menjadi salah satu penghalang lahirnya pencapaian hasil belajar yang tertuang pada kegiatan pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang ***Respons Guru Terhadap Pembatasan Penerapan Kurikulum 2013 Studi Pada SMP Negeri I Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara.***

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada Respons Guru Terhadap Pembatasan Penerapan Kurikulum 2013 Studi Pada SMP Negeri I Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara.

1. **Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada fokus penelitian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman Guru SMP Negeri I Bonegunu tentang Kurikulum 2013 ?
2. Bagaimana Respons Guru di SMP Negeri I Bonegunu terhadap Pembatasan penerapan kurikulum 2013 ?
3. Bagaimana Kesiapan Guru SMP Negeri I Bonegunu dalam Penerapan Kurikulum 2013 ?
4. **Defenisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami judul proposal ini, dan mengetahui arah serta tujuannya, maka berikut akan dipaparkan penegasan judul sebagai berikut:

1. Respons adalah suatu reaksi perilaku yang disebabkan karena perbuatan sebelumnya. Atau dalam bahasa lain respons merupakan jawaban atas suatu perbuatan.
2. Guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik.
3. Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang mengacu pada pendidikan karakter.
4. Respons guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah yang tercantum pada indikator respons yaitu keinginan untuk bertindak atau berpartisipasi aktif, harapan guru, dan antisipasi guru terhadap kurikulum 2013.
5. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
6. *Tujuan Penelitian*

Dengan berpijak pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian nanti adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran dan mengetahui sejauhmana pemahaman guru SMP Negeri I Bonegunu tentang Kurikulum 2013.
2. Untuk mengetahui sejauh mana respons guru di SMP Negeri I Bonegunu terhadap Pembatasan Penerapan Kurikulum 2013.
3. Untuk mengetahui kesiapan Guru SMP Negeri I Bonegunu dalam penerapan kurikulum 2013
4. *Manfaat Penelitian*
5. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan berdasarkan teori pendidikan holistik.
6. Mengembangkan wawasan baru penulis tentang kurikulum 2013 sehingga kedepannya nanti penulis sudah memahami konsep dari kurikulum 2013 tersebut.
1. Anonim, *Buku Perundang-undangan System Pendidikan Nasional Guru dan Dosen, UU. No. 20 Tahun 2003,* (Yogyakarta, 2007), h. 11 [↑](#footnote-ref-2)
2. http://dutaonline.com/2014/01/perubahan-itu-harus-dimulai-dari-sekarang/ di akses 19 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-3)
3. www.Kemendikbud.go.id/kemendikbud/berita/1074 di akses 19 Juni 2015 [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://lugtyastyono60.wordpress.com/2014/12/16/anies-baswedan-menbuddasmen-menghentikan-penerapan-kurikulum-2013/akses> 31 maret 2015. [↑](#footnote-ref-5)